

PERKEMBANGAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

***Charles Hutapea¹⁾**

1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kinerja camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Palangka, indikator yang digunakan untuk mengukur penelitian ini antara lain: *input* (masukan), *process* (proses), *output* (keluaran), dan benefit (manfaat). Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif secara deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai data yang memperkuat data primer. Teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Faktor-faktor yang ditemukan selama observasi dilapangan berasal dari pihak luar (*eksternal*) dan pihak dalam (*internal*). Pihak internal yaitu camat, sekretaris camat, lurah, kepala seksi pemerintahan kecamatan dan dinas-dinas, yang dapat dikatakan sebagai pendukung dan penghambat dan pihak eksternal yaitu masyarakat yang dimana berperan sebagai pendukung dan penghambat.

Kata Kunci: Kinerja Camat; Pembinaan; Pengawasan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan meyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh Bupati/Walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Peran pengawasan Camat terhadap efektifitas pembangunan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan tersebut. Pembangunan desa/kelurahan adalah suatu strategi pembangunan yang dirancang bagi peningkatan kehidupan ekonomi sosial dari kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu. Khusus di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, pembangunan yang ada berupa pembangunan kelurahan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, serta tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat ternyata masih kurang untuk membantu masyarakat desa/kelurahan dalam beraktifitas sehari-hari. Selain itu, dengan adanya program pemerintah 1 milyar 1 desa/kelurahan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan juga menjadi penting untuk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja itu meliputi (1) *Input* (masukan), maksudnya adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, personil, yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, data/informasi, kebijakan/peraturan perundangan dan sebagainya; (2) *Process* (proses)

adalah berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan pelaksanaan pengolahan masukan dan keluaran; (3) *Output* (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh/dicapai dalam suatu kegiatan, baik kegiatan berupa kegiatan fisik maupun non fisik; (4) *Benefit* (manfaat), adalah manfaat yang diperoleh dari hasil (*outcome*) suatu kegiatan. Manfaat akan dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah dan panjang (Badrudin 2015:261).

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai *performance* yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi.

Menurut Rogers dalam Mahmudi (2005:6) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*) karena hasil kerja member keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi, keputusan pelanggan, dan kontribusi ekonomi, setelah suatu kerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam Yerimias T. Kaben dalam buku tentang *Encyclopedia Of Public Administration And Public Policy Tahun 2003* (2004:192) bahwa : Kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* . Kinerja adalah hasil yang dicapai individu sesuai dengan peran dan tugasnya dalam periode tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu tersebut bekerja.

Camat

Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Camat merupakan seorang eksekutif yaitu pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu pengendali pembangunan. Camat adalah seseorang kepala yang membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan (Suryaningrat,1981).

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pemerintahan kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebgai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan, dan penegakan Perda dan Perkada
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana, dan sarana pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan

7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan lebih banyak data-data kualitatif dalam upaya mendeskripsikan kinerja Camat melalui pembinaan dan pengawasan pada beberapa indikator pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono,2013). Dipilihnya pendekatan deskriptif dengan tujuan agar dapat menggali informasi secara mendalam tentang kinerja Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dari para narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari kondisi kewilayahan, Kelurahan Palangka memiliki potensi yang bagus untuk berinventasi di semua sektor baik sektor property, pertokoan, maupun pusat perbelanjaan seperti mall dan kuliner serta tempat hiburan lainnya mengingat sebagian besar kompleks perkantoran baik pemerintah Kota Palangka Raya Maupun Provinsi Kalimantan Tengah berada diwilayah Kelurahan Palangka. Keadaan tersebut dapat menimbulkan potensi masyarakat dalam mengembangkan Pendapatan rumah tangganya sebagai wiraswasta dan pebisnis.

Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintahan kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan seperti, Mengadakan Rapat Pembinaan Kelurahan Sekaligus Bimbingan Teknis Dan Penyamaan Persepsi Terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik di Kecamatan Jekan Raya. Dari hal diatas dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pelayanan publik yang bagaimana seharusnya. Adapun tujuan lain dilaksanakan kegiatan di atas antara lain:

- a. Supaya PNS Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat harus mengetahui porsi dan kewenangannya terutama dalam hal pengesahan dokumen, karena sering terjadi dokumen yang ditandatangani diluar kewenangan. Maka dari itu diadakan pembinaan kelurahan khususnya untuk mengetahui/memahami fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik.
- b. Seperti himbauan Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya membahas mengenai Bimbingan Teknis dan Penyamaan Persepsi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintahan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. dengan ditetapkannya SOP diharapkan akan membuat birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan kejelasan serta kepastian hukum baik aparatur maupun masyarakat umum sebagai objek pelayanan publik.
- c. Agar pelayanan publik digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, konsisten, standart dan sistematis.

1. Indikator *Input* (masukan)

Agar pembinaan bisa berjalan dengan baik, maka program pembinaan yang dilakukan adalah: Bimbingan, Supervisi, Konsultasi. Berdasarkan teori pengawasan serta amanat peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilihat dari beberapa hal yaitu : (1) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan kelurahan dan peraturan luarah; (2) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan; (3) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan; (4) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi kinerja luarah dan perangkat kelurahan; (5) cara/tindakan camat dalam mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; (6) cara/tindakan camat dalam mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2. Indikator *Process* (Proses)

Dalam hal ini ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan maka camat akan meminta laporan pembinaan sebelumnya apakah seperti yang telah direncanakan, apabila tidak sesuai yang telah direncanakan maka akan dilaukan rapat untuk megevaluasinya guna untuk selanjutnya agar tercapai seperti yang telah direncanakan. Dan melihat kendala-kendala apa yang dirasakan sehingga tidak tercapai kegiatan yag telah direncanakan. Salah satu proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilakukan kecamatan adalah kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang).

3. Indikator *Output* (Keluaran)

Output merupakan salah satu faktor penting dalam mengukut kinerja Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, karena dalam hal ini output merupakan sesuai yang diharapkan langsung dapat diperoleh dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini jika pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan maka output yang diperoleh keyakinan yang memadai dan dapat dilihat laporan hasil.

4. Indikator *Benefit* (Manfaat)

Benefit (manfaat) adakah pengaruh/akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan, untuk mengetahui manfaat daro pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan hasil wawancara terhadap bebrapa narasumber dalam hal ini manfaat yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan khususnya yang paling diperhatikan Camat adalah tertib administarsi kelurahan yang dimana manfaat yang dirasakan yaitu akan mempermudah untuk bisa lebih tertib administrasi dan lebih mudah memperoleh data-data yang diperlukan.

Mengadakan pertemuan RT/RW Se-Kecamatan Jekan Raya Pertemuan ini dilakukan guna dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jekan Raya maka sangat diperlukan adanya pemerintahan kecamatan, kelurahan dan Ketua RT/RW yang memahami tugas pokok dan fungsinya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Palangka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menjadi kendala untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan oleh Camat Jekan Raya yaitu faktor internal yang terdiri dari : SDM (sumber daya manusia) baik kualitas maupun kuantitas, anggaran (dana), serta sarana dan prasarana yang digunakan dan faktor eksternalnya yaitu tugas pembinaan dan pengawasan seperti masyarakat yang dimana tujuan pembinaan dan pengawasan untuk masyarakat.

yang menjadi pihak internal yakni camat, sekretaris camat, kepala tata pemerintahan kecamatan, lurah dan lembaga kemasyarakatan. Pihak internal ini bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat apabila dilihat dari segi berbeda, maksudnya camat sebagai pihak utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bisa menjadi pendukung dan penghambat melihat kinerja dan kemampuannya. Dengan demikian dapat dikatakan pihak pemerintah itu bisa menjadi pendukung dan penghambat dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan di kelurahan Palangka tergantung dari sisi kita melihatnya

Faktor Eksternal

Masyarakat dapat dikatakan faktor pendukung memiliki banyak pengaruh dalam berlangsungnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan Palangka. Salah satunya yang menjadi faktor pendukung dilihat dengan bagaimana masyarakat menanggapi pembinaan yang telah dilakukan camat dana melihat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa membantu program yang sedang berlangsung dan memberikan masukan kepada kelurahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik yang dilakukan di kelurahan seperti apa. Selanjutnya masyarakat sebagai pendukung seperti masyarakat memiliki sikap untuk membangun daerahnya atau bisa disebut SDM (sumber daya manusia), seperti dalam hal pemerintah mengadakan musyawarah dalam masalah-masaklah yang ada disekitar kelurahan masyarakat ikut dalam rapat dan ikut bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan Palangka di Kecamatan Jekan Raya , maka camat mempunyai peranan sebagai berikut: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Sedangkan Faktor pendukung dan penghambat kinerja camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu, Faktor Internal dimana Camat, Lurah, lembaga kemasyarakatan dan aparat pemerintah kecamatan serta kelurahan dapat dikatakan pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, apabila mereka dapat bekerja sama dalam melancarkan pembinan dan pengawasan maka akan tercapai visi misi yang diinginkan, namun apabila hanya 1 pihak saja yang melaksanakan tidak akan tercapai visi misi. Dengan demikian faktor internal ini bisa dilihat menjadi 2 (dua) sisi tergantung dari objek yang dilihat.

Untuk Faktor eksternal ditemukan bahwa, masyarakat dapat dikatakan sebagai pendukung dan penghambat. Masyarakat yang dapat menerima pembinaan dan pengawasan sehingga dapat membantu pemerintahan kelurahan dan begitu juga sebaliknya apabila masyarakat yang tidak peduli terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akan memperlambat kemajuan kelurahan contohnya pembangunan.

REFERENSI

- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung:Alfabeta
Badudu, J. S, Zain, Sutan Mohammad, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Cetakan Pertama. Bandung : CV Pustaka Setia
- Kaloh.J. 2003. *Kepala Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*. Penerbit : UI-Press. Jakarta
- Liau, Gasper. 2015. *Administrasi Pembangunan, Cetakan Pertama*. Bandung : PT Refika Aditama
- Lukman, Sampara, 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN press
- Moleong,L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Sadu Wasistino,dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Cetakan Pertama. Bandung : Fokusmedia
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo.2013. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Cetakan Keempat. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta
- Sunarno, Siswanto.2005. *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*. Cetakan Petama. Jakarta : Sinar Grafika
- Supripto, C, Soleh. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung : Fokusmedia
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Rajawali Pers.